

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam Rekonstruksi Demokrasi di Kota Palembang

Bab ini berisikan pembahasan mengenai Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Terhadap Rekonstruksi Demokrasi di Palembang, pada bab ini penulis menganalisis data – data yang didapat dari hasil penelitian dan observasi lapangan.

Berdasarkan urian pada Bab I, terdapat permasalahan pokok berkenan dengan PERan KNPI terhadap Rekonstruksi Demokrasi di Palembang, yakni peran serta KNPI dalam mendorong perbaikan demokrasi baik ditataran pemerintahan kota Palembang dan dikalangan elemen masyarakat kota Palembang yang dirasakan belum maksimal.

Pasca reformasi lengsernya kekuasaan orde baru (Soeharto) pada mei 1998, focus isu yang menjadi perkerjaan rumah KNPI tidak terpikikan secara baik dan sistemastis, ketika itu pada waktu pra 1998 keberadaan KNPI secara kelembagaan masih begitu ambang untuk dilihat dikalangan masyarakat, namun dilihat secara grafis KNPI tiga focus gerakan, yakni: 1. Menjadikan jiwa pemuda yang intelektual , kritis terhadap kebijakan. 2. Memberikan ha katas pendapat dan menyuarakan aspirasinya. 3. Mempertahankan kesejahteraan masyarakat maupun lingkungan madani.

Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara kepada 5 orang, yang meliputi Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Palembang, 2 orang unsur pimpinan KNPI, 1 unsur tokoh masyarakat, 1 unsur kalangan akademis/pemuda, wawancara dilakukan bulan April – Juli 2021. Wawancara dilakukan di Kota Palembang dengan cara bertatap muka langsung dengan narasumber yang disebutkan dalam penelitian ini.

Dalam bentuk perwujudan dan pelaksanaan fungsi dan tugas KNPI, tentunya sangat tergantung dari kinerja yang dimiliki mereka sekarang. Dengan adanya peran serta dalam mewujudkannya maka masyarakat akan melihat proses terbentuknya demokrasi yang sangat sekali diinginkan oleh masyarakat. Maka itu terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh KNPI untuk rekonstruksi demokrasi di Palembang, sebagai berikut :

1. Peran Pendampingan

Dikalangan dunia pengembang masyarakat istilah “ Pendampingan “ merupakan istilah baru yang muncul sekitar tahun 1990- an, sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “ Pembinaan “. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada Pembina dan yang dibina, Pembina adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinaan sedangkan yang dibina adalah kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu istilah pendampingan menunjukkan kesetaraan, yang didampingi justru harus lebih aktif sedangkan pendamping lebih bersifat membantu saja.

Dengan demikian pendampingan dapat diartikan sebagai satu interaksi yang harus terus menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat yang didampingi, hingga terjadinya proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan terdidik (bukan berarti harus memiliki pendidikan formal).

Berikut petikan wawancara penulis dengan Subandi, ketua umum KNPI Palembang, bagaimana Peran KNPI dalam pendampingan masyarakat marginal di Kota Palembang, dan berikut jawaban dari narasumber :

“ Masyarakat marginal atau masyarakat kelas bawah, acapkali dipandang sebagai masyarakat yang bodoh dan mudah diperalat oleh kaum yang lebih berkuasa atau segolongan masyarakat yang memiliki kemampuan modal capital yang kuat. Oleh karena itu peran aktivis khususnya Pengurus KNPI atau penggiat gerakan social hendaknya dapat mengorganisir kaum marginal untuk dapat menemukan kesadarannya terhadap keadaan ketertindasannya dan menemukan bentuk perlawanan terhadap keadilan tersebut sehingga mencapai apa yang menjadi keadilan bagi mereka.” (Hasil wawancara : 10 April 2021)

Gambar 1.3 pengurus KNPI mendampingi masyarakat dan pemuda Palembang untuk melakukan pembagian sembako.



Sumber : Dokumentasi Pengurus KNPI

Berikut petikan wawancara penulis dengan Novarizal, Sekretaris Umum KNPI Sumsel , bagaimana peran KNPI dalam pendidikan demokrasi bagi masyarakat sipil di Kota Palembang., dan berikut jawaban dari narasumber :

“ Pada masa sebelum reformasi 1998, masyarakat sipil senantiasa dihantui dengan rasa takut untuk bersuara atau menyatakan pendapat yang bertentangan dengan rezim berkuasa kala itu, ketika seseorang atau sekelompok masyarakat sipil mencoba untuk menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan arah kebijakan penguasa Orba maka sudah dapat dipastikan penguasa Orba akan menyatakan seseorang tersebut atau kelompok masyarakat tersebut adalah ekstrim kiri atau ekstrim kanan, oleh karena itu KNPI yang merupakan wadah bagi pemuda ataupun perjuangan masyarakat mencoba untuk mengorganisir kelompok – kelompok masyarakat sipil baik dikalangan intelektual kampus (Dosen dan

Mahasiswa), pencegara muda, pelajar muda untuk bersama –sama memperjuangkan demokrasi dan HAM “.(Hasil wawancara : 15 April 2021)

Gambar 1.4 pengurus KNPI bersama aparaturnegara bekerja sama dalam proses pemulihan kasus covid 19.



Sumber : Dokumentasi Pengurus KNPI

2. Peran Penyadaran

Usaha untuk melakukan penyadaran akan bermuara pada satu kesadaran, manusia berperan dalam menciptakan kembali realitas materialitas. Kesadaran tersebut dikondisikan oleh realitas sebagaimana dialami dan dihantarkan melalui pikiran–bahasa. Kesadaran bukan hanya suatu tiruan atau cermin dari yang nyata. Situasi yang ada tidak akan abadi dan tidak menjadi subjek penentu pemilik kesadaran karena bagaimanapun juga manusia lebih unggul dari dunia atau sejarah.

Dan yang nyata bukan hanya konstruksi kesadaran yang berubah–ubah. Kesadaran kritis adalah keterarahan yang ditandai dengan adanya pengertian manusia mengenai semua hubungan kausal suatu situasi dan kekuatan refleksi untuk ikut dalam sejarah. Suatu kesadaran yang benar–benar terarah kepada dunia adalah kesadaran yang menggabungkan refleksi dengan tindakan yang bertujuan pembebasan manusia.

Berikut adalah wawancara penulis dengan Andi Anugraha, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, bagaimana peran Ban-Kesbangpol Kota Palembang dalam pendataan dan pembinaan LSM, Ormas dan OKP yang terdapat di Kota Palembang, berikut jawabannya :

“ Badan Kesbangpol Kota Palembang merupakan perpanjangan

tangan dari Pemerintah Kota Palembang yang bertugas salah satunya adalah untuk melakukan pendataan dan pembinaan kepada OKP / Ormas yang berada dan beraktifitas di Kota Palembang, namun harus kami akui sepanjang tahun 2020 hanya terdapat 30-an Ormas, LSM dan OKP yang baru terdata secara demokrasi, pendataan dilakukan apabila organisasi – organisasi tersebut melakukan pendaftaran ke kantor kami, badan Kesbangpol Kota Palembang berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada para penggiat Ormas, LSM dan OKP yang terdaftar tersebut dengan seringkali kita laksanakan kegiatan berupa seminar, lokalkarya, dan dsikusi yang menghadirkan organisasi – organisasi tersebut dengan bekerjasama dengan instansi terkait dengan beragam isu dan tema yang kita usung baik itu soal demokrasi, wawasan kebangsaan, lingkungan hidup, pemahaman terhadap Pancasila, dan lain – lain.” (Hasil Wawancara : 5 Mei 2021)

Gambar 1.5 pengurus KNPI bersama para pengusaha muda melakukan seminar entrepreneur untuk mencari bibit–bibit unggul dalam menjadi pengusaha.





Sumber : Dokumentasi Pengurus KNPI

Berikut wawancara penulis dengan salah satu tokoh akademisi, Azwar Agus, bagaimana Peran KNPI Kota Palembang dalam penguatan pemahaman pemuda tentang wawasan kebangsaan, sebagai berikut jawabannya :

“ Ditengah kehidupan yang kian kompleks saat ini, dimana tingkat permasalahan semakin meningkat dan gempuran budaya dari luar yang kian kencang masuk ke Negara kita tentu keadaan ini membawa keprihatinan kami selaku pemuda di Kota Palembang, kita sama – sama mengetahui bahwa Kota Palembang tengah menapak dan menjelma menjadi kota yang metropolis, segenap pembangunan setiap harinya hadir di Kota Palembang, budaya pop dikalangan pemuda/i tidak dapat kita hindari, disinilah kita selaku pengurus KNPI Kota Palembang terjaga untuk dapat berbuat guna membentengi Kota kita dari kerusakan yang massif dikalangan pemuda kita dengan jalan kembali mendekatkan pemuda dengan penyadaran dan pemahaman nilai – nilai kebangsaan terutama nilai – nilai demokrasi.” (Hasil wawancara : 10 Mei 2021)

Gambar 1.6 pengurus KNPI melakukan seminar motivasi agar pemuda lebih giat dan aktif dalam menyenam pendidikan yang lebih tinggi.



Sumber : Dokumentasi Pengurus KNPI

Berikut wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat, Bapak Lidayanto (mantan Anggota DPRD Sumsel tahun 2003 dari Fraksi Partai Golkar), bagaimana peran KNPI yang dirasakan masyarakat dalam proses meningkatkan rekontruksi demokrasi di Kota Palembang. Berikut jawabannya :

“ pada pasca reformasi giat yang dilakukan pemuda – pemuda KNPI tentu banyak membuahkan hasil yang berpengaruh di lingkungan masyarakat kota Palembang, dengan adanya KNPI sebagai wadah proses pemuda untuk melatih diri dalam jiwa pemimpin juga sebagai laboratorium bagi seleruh organisasi pemuda dan mahasiswa. Dalam hal ini KNPI bias dikatakan sebagai lembaga kepemudaan yang siap untuk memberikan potensi – potensi tentang nilai – nilai demokrasi, seperti mengajak kalangan muda dalam keikutsertaan dalam partisipasi pemilu, kaderisasi keanggotaan dan penegak utama demokrasi pemuda dengan pemikiran intelektual.” (Hasil wawancara : 18 mei 2021)

Gambar 1.7 Ketua Umum KNPI Palembang melakukan wawancara dengan media televisi untuk penyadaran atas peran yang dilakukan pengurus KNPI.



Sumber : Dokumentasi Pengurus KNPI

Gambar 1.8 pengurus KNPI mengikuti Upacara hari kebangkitan nasional agar para pemuda lebih mendalami lagi rasa nasionalisme.



Sumber : Dokumentasi Pengurus KNPI

Berdasarkan Undang – undang No 17 tahun 2013, maka peran Organisasi Kepemudaan atau KNPI dalam mendorong rekontruksi Demokrasi diKota Palembang adalah syarat utama dalam perwujudan pemerintahan yang demokratis, demokrasi dapat dipandang sebagai landasan yang memberi jiwa atau warna pada sistem politik, atau yang memberi arah pada peran – peran politik yang dilakukan oleh struktur politik. Titik utama dalam perwujudan demokrasi ada pada cibil society atau yang dimaksud dengan masyarakat madani yang mencerminkan adanya demokrasi, kesetaraan, kemajemukan, perbedaan,

intelektual, dan berdasarkan atas penghormatan terhadap hukan dan HAM.

Demokrasi dalam masyarakat sipil harus pula mencakup dua pola, yakni demokrasi procedural dan demokrasi konstitusional. Demokrasi procedural menekankan pada aturan suara rakyat sebagai calon cara terjujur untuk mengatasi konflik. Demokrasi procedural memberikan prioritas kepada hak yang menuntut lahirnya kejujuran, sedangkan demokrasi konstitusional memberikan prioritas kepada hak yang menuntut lahirnya out-come yang dapat melindungi kepentingan utama (vital interests) dari masing – masing individu.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah merupakan tempat berkumpulnya dan bertemunya pemuda untuk membicarakan, menyampaikan, dan mengajukan protes/gagasan ide jika sesuatu bertentangan dengan aspirasinya. Rakyat atau pemuda dengan inisiatif sendiri berkumpul sesuai dengan kesamaan – kesamaan tertentu.

Dalam masyarakat sipil, KNPI ini diakui keberadaan dan perannya sebagai penentu dan pengontrol kebijakan. Di sini demokrasi mulai lahir dan di sini pemuda itu bersuara demokrasi. Ciri – ciri yang melekat pada pemikiran, gagasan yang intelektual dan bersumberkan dari demokrasi.

Transformasi organisasi – organisasi social politik yang ada kedalam atau menjadi kelembagaan masyarakat merupakan hal yang amat penting dalam mewujudkan nilai – nilai masyarakat yang demokratis. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa manusia ini merdeka memasuki suatu sarekat atau organisasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Suatu sarekat atau organisasi bias berupa organisasi politik atau organisasi social atau bahkan juga organisasi ekonomi dan

pertahanan keamanan.

Ketika orang – orang sudah memilih kemana seharusnya mereka berkumpul untuk memperjuangkan cita – cita, kebutuhan dan aspirasinya, maka lahirlah organisasi social, organisasi poltik, organisasi ekonomi dan organisasi– organisasi lainnya. Partai politik lahir, LSM mulai timbul, koperasi juga ada, organisasi siskamling juga dibutuhkan, demikian pula kelompok kepentingan mulai hidup.

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan pengolahan data yang diperoleh dari lapangan, peran KNPI terhadap rekonstruksi demokrasi di Kota Palembang, maka dapat dilihat peran KNPI yang ada diKota Palembang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan paham demokrasi dan Hak Azasi Manusia dikalangan masyarakat sipil dan pemuda sebagai isu sentral yang dikampanyekan.
2. Mengorganisir dan menggalang kekuatan masyarakat dan pemuda ke dalam kelompok–kelompok isu atau kepentingan gerakan yang diperjuangkan.
3. Melakukan perlawanan kepada penguasa yang otoriter dan militeristik secara sistematis, terorganisir dan massif dengan bersama-sama element masyarakat lainnya.
4. Melakukan aliansi–aliansi taktis dan strategis dengan banyak kelompok baik dikalangan kampus, media massa, buruh, oetani, komunitas masyarakat adat dan kaum miskin kota.

5. Mengadakan forum–forum ilmiah dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dengan seperti seminar, lokakarya, diskusi terbatas, mimbar bebas, pertunjukan kesenian teater rakyat dan lainnya.
6. Melakukan unjuk rasa, aksi diam dan mogok kerja dalam penyelamatan hak-hak yang tidak sesuai keadilan.

Bagaimanapun juga, penamaan dapat mencerminkan kiprah sebuah organisasi. Secara konseptual, organisasi pemerintahan / non-pemerintahan sering didefinisikan sebagai organisasi–organisasi bukan milik Negara dan bertujuan tidak mencari keuntungan, walaupun sederhana. Berdasarkan undang – undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwasanya KNPI adalah sebuah organisasi pemuda namun tetap menjunjung nilai – nilai kemasyarakatan. Sehingga isi dari pada anggotanya yaitu baik dari kalangan intelektual, akademisi, pemuda , serta masyarakat madani.

Baik organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintahan adalah wadah warga, rakyat, masyarakat untuk berekspresi dan mengaspresiasi pikiran ditengah masyarakat bangsa dan Negara. Namun, ada beberapa perbedaan diantaranya keduanya. Orientasi Organisasi masyarakat mencakup hampir seluruh bidang pembangunan, sedangkan organisasi non pemerintah lebih khusus “ meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan social “.

Oleh sebab itu untuk menjadikan KNPI sebagai organisasi / lembaga yang tangguh maka sudah sepatutnya KNPI harus memiliki sifat kemandirian dan keswadayaan sehingga dengan begitu dapat secara terus menerus melakukan control dan kritik terhadap kebijakan Negara yang dapat merugikan rakyat.

B. Tantangan yang di Hadapi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam Rekonstruksi Demokrasi di Palembang

Adapun yang menjadikan beberapa tantangan yang dihadapi KNPI dalam bentuk perwujudan rekonstruksi demokrasi, sebagai berikut.

1. Lemahnya Pengetahuan

Didalam organisasi tentunya pengetahuan dari SDM tersebut harus memiliki ide, gagasan yang kuat dalam berkomunikasi maupun berpendapat. Istilah pengetahuan dikenal sebagai pemikiran yang berupa fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh individu melalui pendidikan, pengalaman dan pembelajaran secara teoritis atau otodidak. Pengetahuan juga adalah informasi yang dimiliki seseorang atau individu.

Dengan begitu jika pengetahuan yang dimiliki oleh pengurus KNPI sangat begitu lemah sangat tidak diuntungkan untuk melaksanakan proses perwujudan rekonstruksi demokrasi. Tanpa adanya informasi yang dimiliki oleh individu tentunya akan semakin mempersulit proses pelaksanaannya. Dalam rekonstruksi demokrasi tentu bukan hal yang semudah dengan hanya melakukan kegiatan yang bersifat kesosialan tetapi lebih memprioritaskan dengan pelaksanaan fungsi dan peran demokrasi.

Berikut petikan wawancara penulis dengan Sekertaris Umum KNPI Sumsel , Bapak Novarizal apa faktor kurangnya ketajaman KNPI dalam rekonstruksi demokrasi di Kota Palembang., dan berikut jawaban dari narasumber :

“ organisasi kerap sekali menjalankan program – program yang sangat berkaitan dengan pemerintahan, mulai dari menjalankan visi – misi

dan pada kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi, maka dari KNPI sendiri sangat membutuhkan pemuda-pemuda yang memiliki pemikiran intelektual, para akademis yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga proses dari ketajaman pengurus KNPI itu bias berjalan dengan baik dan tidak ketinggalan zaman, itulah yang harus ditekankan untuk masa ini dalam pengurusan.” (Hasil Wawancara 11 juni 2021)

2. Lemahnya Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Budiman & Riyanto, 2013). Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin cepat menerima dan memahami suatu informasi sehingga pengetahuan yang dimiliki juga semakin tinggi (Sriningsih, 2011). Semakin banyak informasi yang masuk maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapat mengenai kesehatan (Agus, 2013)

Pendidikan merupakan salah satu cara seseorang mendapatkan sebuah pemikiran yang intelektual, praktis dan menjadikan sebuah karakter individu lebih mendalami beragam pengetahuan. Pendidikan khususnya di Kota Palembang sendiri sudah banyak yang bagus bahkan memiliki fasilitas yang lengkap dengan pembelajaran sesuai dengan Pancasila. Menurut UU Sisdiknas ini pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki karakter spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian & kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara.

Berikut petikan wawancara penulis dengan tokoh akademis Azwar Agus,

berikut jawaban dari narasumber :

“ dalam organisasi kepemudaan tentunya harus memiliki jiwa pemimpin yang kuat, dewasa dalam berpikir dan agresif cepat dalam mengambil keputusan. Nah ini yang masih lemah dalam pengurusan, banyak para orang pintar tetapi dalam proses pendewasaan diri masih jauh kalah dengan orang yang benar – benar memahami prosesnya kehidupan. Maka itulah pendidikan sangatlah penting dalam proses pendewasaan setiap individu. (Hasil wawancara 05 mei 2021)

Pendidikan juga mengajarkan sikap pendewasaan diri, mulai dari kestabilan sikap yang harus disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan, adanya sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, adanya sifat kemandirian yang tinggi tanpa menggantungkan tugas pada orang lain. Dengan begitu sangatlah penting landasan dasar pendidikan bagi pengurus aktif KNPI agar saat pelaksanaan perwujudan demokrasi berjalan dengan baik.

Kegiatan pendidikan juga menekankan pada suatu proses pengalaman, tetapi pengalaman ini harus mengarahkan individu kepada pertumbuhan batin, sehingga dengan pertumbuhan batin ini mereka dapat eksis di tengah-tengah lingkungannya dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi tanpa harus selalu tergantung pada orang lain. Pandangan Dewey tentang pendidikan jelas menekankan bahwa pengalaman menjadi dasar dalam pembentukan dan upaya memacu pertumbuhan individu yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya masing-masing.

3. Informasi/ media massa

Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Informasi diperoleh dari pendidikan formal

maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan. Semakin berkembangnya teknologi menyediakan bermacam-macam media massa sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat. Informasi mempengaruhi pengetahuan seseorang jika sering mendapatkan informasi tentang suatu pembelajaran maka akan menambah pengetahuan dan wawasannya, sedangkan seseorang yang tidak sering menerima informasi tidak akan menambah pengetahuan dan wawasannya.

Berikut petikan wawancara penulis dengan Subandi, ketua KNPI Palembang, apa tantangan KNPI dalam rekonstruksi demokrasi di Kota Palembang. dan berikut jawaban dari narasumber :

“ media massa sangatlah penting untuk setiap moment ataupun dokumentasi, mereka merupakan salah satu peralatan canggih dan teknologi yang sangat digemari oleh banyak masyarakat. Tetapi yang sangat disayangkan jika dalam proses penggunaannya hanya sebatas pembodohan public serta penyebar hoax, lebih baik tidak diperalatan untuk hal yang hanya menguntungkan pribadi saja. Gunakan dan fungsikanlah alat-alat teknologi canggih ini untuk mendedikasi segala bentuk dokumentasi yang baik dan menyebarkan berita-berita yang actual.” (hasil wawancara 07 juli 2021)

4. Sosial, budaya dan ekonomi

Tradisi atau budaya seseorang yang dilakukan tanpa penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk akan menambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu sehingga status ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan seseorang. Seseorang yang mempunyai sosial budaya yang baik maka pengetahuannya akan baik tapi jika sosial budayanya kurang baik maka pengetahuannya akan kurang baik. Status ekonomi seseorang mempengaruhi

tingkat pengetahuan karena seseorang yang memiliki status ekonomi dibawah rata-rata maka seseorang tersebut akan sulit untuk memenuhi fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan.

Berikut petikan wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, lidayanto, apa tantangan yang dilawan KNPI dalam rekonstruksi demokrasi di Kota Palembang., dan berikut jawaban dari narasumber :

“ faktor ekonomi, social dan budaya memang kerap tidak memperuntungkan dalam proses kegiatan – kegiatan KNPI, perbedaan lingkungan tentu terkadang hanya memperlambat proses rekonstruksi. Pada dasarnya kehidupan bermasyarakat tentu tidak jauh dari dasar–dasar kebudayaan, karena itulah dalam menjalankan kegiatan harus benar–benar memperhatikan nilai dan unsur social budaya dari lingkungan tersebut.” (hasil wawancara 20 juli 2021)